

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
T A H U N 2 0 2 5



UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dari tahun ketahun terus berupaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yaitu fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya diamanatkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, masing-masing Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk menyusun program dan kegiatan setiap tahun anggaran yang tertuang dalam RAPBD yang dalam prosesnya dilakukan pembahasan dan pengesahan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Setelah DPA APBD disahkan maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Daerah yang disampaikan kepada DPRD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Daerah tersebut, bertujuan untuk menyajikan informasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran tersebut yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Daerah Tahun 2025, disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391).
4. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan bahwa RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) UPT RSUD Alimuddin Umar Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 , Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 RSUD Alimuddin Umar tanggal 10 Oktober 2025.

1.2 Dasar Hukum

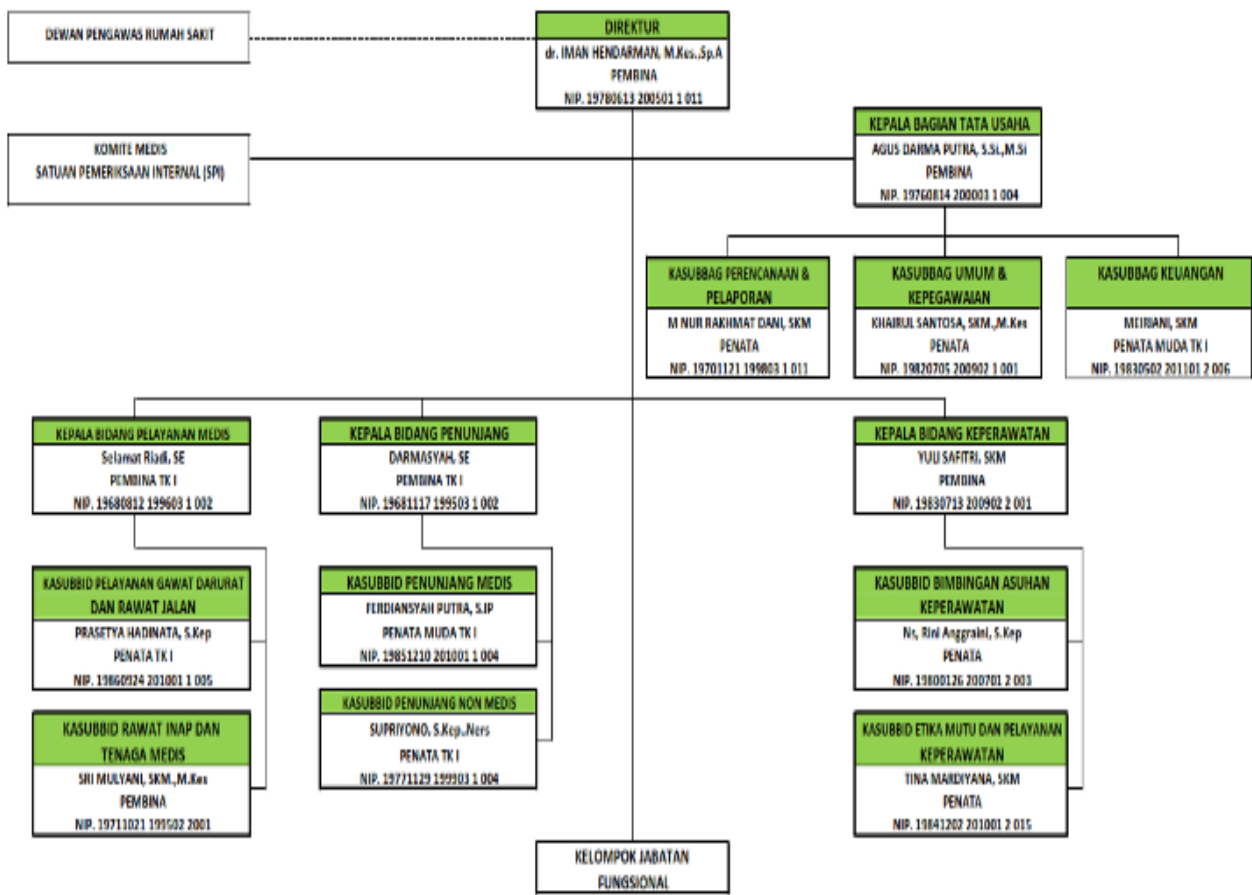
- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah.
- 4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 5) Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupten Lampung Barat.
- 7) Perjanjian Kinerja Perubahan UPT RSUD Alimuddin Umar tahun 2025.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi

pada Dinas Kesehatan bahwa RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
maka struktur organisasi RSUD Alimuddin Umar mengalami perubahan sbb :

STRUKTUR ORGANISASI UPT RSUD ALIMUDDIN UMAR



Adapun Struktur Organisasi UPT RSUD Alimuddin Umar sebagai berikut :

- I. SUSUNAN ORGANISASI :
 - a. Direktur;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pelayanan, membawahi :

- Sub Bidang Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Jalan;
- Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Tenaga Medis
- d. Bidang Keperawatan, membawahi :
 - Sub Bidang Bimbingan Asuhan Keperawatan;
 - Sub Bidang Etika Mutu dan Pelayanan Keperawatan
- e. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
 - Sub Bidang Penunjang Medis;
 - Sub Bidang Penunjang Non Medis.
- f. Komite Medis;
- g. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
- h. Dewan Pengawas Rumah Sakit;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Visi dan Misi Kepala Daerah

Selaras dengan Visi Indonesia dan Visi Provinsi Lampung, maka di dalam RPJMD, Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2025-2045 adalah :

Visi : “ Kabupaten Lampung Barat yang Sejahtera, Maju, Berdaya saing dan Berkelanjutan “

Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi yang diemban oleh UPT RSUD Alimuddin Umar adalah :

Misi 1 : Transformasi Sosial : Mewujudkan SDM yang Unggul, adaptif dan produktif

Misi 3 : Transformasi Tata Kelola : Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas dan merata

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis

Rencana Strategis UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 050/ 019 /III.02/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu

dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 disusun berdasarkan visi kepala daerah yang dituangkan dalam visi RPJPD Kabupaten Lampung Barat adalah :

“ Kabupaten Lampung Barat yang Sejahtera, Maju, Berdaya saing dan Berkelanjutan “

Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 tersebut diatas RSUD Alimuddin Umar mengemban 2 Misi sebagai berikut :

- 1. Transformasi sosial : Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkualitas dan berbudaya
- 2. Transformasi Tata Kelola : Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance) yang akuntable, Pelayanan Publik yang Berkualitas serta kehidupan Masyarakat yang aman dan damai.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Rsud Alimuddin Umar Tahun 2023 - 2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Rsud Alimuddin Umar
Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	86	87	88	89	

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	nilai	Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	survei indeks kepuasan masyarakat 2 kali setahun atau per semester dengan jumlah responden 500 responden total 1000 responden pertahun	25,0- 64,9 D = Tidak baik65,0 - 76,6 C = Kurang baik76,61 - 88,3 B = Baik88,3 - 100 A = Sangat Baik

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	87

Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Rsud Alimuddin Umar terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Tahun 2025

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Rsud Alimuddin Umar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Tahun 2025 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat	nilai	86	87	88	89

Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Rsud Alimuddin Umar serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Sebagai UPT Pada Dinas Kesehatan sejak tahun 2022, UPT RSUD Alimuddin Umar tidak memiliki IKU, sebaliknya mendukung IKU Dinas Kesehatan.

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Data Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar terletak di Kabupaten Lampung Barat yang secara geografis terletak pada koordinat 5°01'976" LS dan 104°04'427" BT dengan ketinggian 930 meter diatas permukaan laut, diatas tanah seluas 5,5 ha dengan luas bangunan 15.153 m². Pembangunan RSUD Alimuddin Umar pada tahun 1997/1998 merupakan rumah sakit tipe C yang didanai dari APBN dan Dana Bantuan ADB III Departemen Kesehatan RI serta APBD.

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat mulai beroperasi pada tanggal 9 November 1998 dan secara resmi di operasionalkan pada tanggal 28 November 1998 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI yang pada masa itu dijabat oleh Prof. DR. dr. H. Faried Anfasa Moeloek, Sp. OG.

Letak RSUD Alimuddin Umar berada di dataran tinggi yang berlokasi di Liwa, yang merupakan Ibukota Kabupaten Lampung Barat. Wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi mulai dari dataran disebelah barat hingga daerah bergunung, dengan batas wilayah kabupaten sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan)
- Sebelah Selatan : Kab. Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat : Kabupaten Pesisir Barat
- Sebelah timur : Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan

I. FASILITAS PELAYANAN

a. Rawat Jalan

Terdapat 9 (sembilan) unit pelayanan rawat jalan yaitu:

1. Poliklinik Umum
2. Poliklinik Anak
3. Poliklinik Kebidanan
4. Poliklinik Penyakit Dalam
5. Poliklinik Bedah
6. Poliklinik Gigi
7. Poliklinik THT
8. Poliklinik Mata
9. Poliklinik Gizi

b. Rawat Inap

Terdapat 9 (sembilan) ruang rawat inap yaitu:

- 1. Ruang Kebidanan
- 2. Ruang Anak dan NICU
- 3. Ruang ICU
- 4. Ruang PICU
- 5. Ruang Bedah
- 6. Ruang Penyakit Dalam
- 7. Ruang Kelas I
- 8. Ruang VIP / VVIP
- 9. Ruang Infeksius

Distribusi tempat tidur berdasarkan kelas dan ruang rawat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Distribusi tempat tidur menurut ruang rawat dan kelas

No	Ruangan	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Non Kelas	Jumlah
1	Kebidanan	-	4	3	6	-	13
2	Anak	-	1	3	5	-	9
3	Perinatologi	-	-	-	-	6	6
4	Bedah	-	-	6	13		19
5	Penyakit Dalam	-	-	12	14		26
6	ICU	-	-	-	-	7	7
7	NICU	-	-	-	-	5	5
8	PICU	-	-	-	-	3	3
9	Kelas I	-	16	-	-	-	16
10	VIP A	8	-	-	-	-	8
11	VIP B	4	-	-	-	-	4
12	Infeksius	-	-	-	-	14	14
	Jumlah	12	22	22	46	28	130

c. Penunjang Medik

- 1. Radiologi
- 2. Farmasi
- 3. Laboratorium

d. Instalasi & Unit

Saat terdapat 9 Instalasi dan 2 Unit pelayanan, yaitu :

- 1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- 2. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
- 3. Instalasi Hemodialisa
- 4. Instalasi Central Sterile Supply Department (CSSD) dan Laundry
- 5. Instalasi Gizi
- 6. IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit)
- 7. Instalasi Kesehatan Lingkungan
- 8. Instalasi Fisioterapi
- 9. Instalasi Rekam Medis
- 10. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (UPKRS)
- 11. Unit Transfusi Darah (UTD RS)

e. Fasilitas gedung/ bangunan :

- 1. Mushola : 1 Unit
- 2. Jumlah Gedung : 52 unit

f. Fasilitas gedung/ bangunan Rumah Dinas dan Jabatan

- 1. Rumah Dinas Dokter Spesialis : 4 unit
- 2. Rumah Dinas Dokter Umum : 2 unit
- 3. Asrama : 2 unit

g. Fasilitas peralatan Rumah Sakit

- 1. Peralatan medik : 724 unit
- 2. Peralatan penunjang medik : 120 unit
- 3. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga : 724 unit
- 4. Aset lain-lain : 308 unit

h. Fasilitas Transportasi Rumah Sakit

- 1. Kendaraan operasional roda empat : 6 unit
- 2. Kendaraan operasional roda dua : 1 unit
- 3. Kendaraan ambulan : 7 unit

BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Target pendapatan UPT RSUD Alimuddin Umar sampai dengan Desember 2025 dari target sebesar **Rp. 24.400.000.000,-** (*Dua puluh empat milyar empat ratus juta rupiah*) terealisasi sebesar **Rp.28.524.618.225,-** (*Dua puluh delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta tujuh enam ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*) atau tercapai **116,9%**.

Adapun SiLpa tahun 2025 adalah sbb :

Kas di bendahara Pengeluaran APBD	:	0,-
Kas di Bendahara penerimaan	:	6.241.159,-
Kas di BLUD	:	72.270.198,-
Bank BNI	:	<u>4.202.636.934,-</u>
JUMLAH	:	4.281.148.291,-

2.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Tingkat capaian kinerja pada UPT RSUD Alimuddin Umar tahun 2025 sebesar **100 %** dan dari target belanja RSUD Alimuddin Umar sampai dengan 31 Desember 2025 dari target sebesar **Rp.41.518.131.099,-** (*Empat puluh satu milyar lima ratus delapan belas juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah*) terealisasi sebesar **Rp.40.469.244.135,-** (*Empat puluh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh lima rupiah*) atau tercapai dengan persentase **97,47 %**. Terdapat efisiensi sumberdaya sebesar **2,53 %** maka dapat disimpulkan bahwa RSUD Alimuddin Umar dapat memaksimalkan kinerja nya yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025.

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

3.1 Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	RSUD Alimuddin Umar	Pemanfaatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Efektifitas tata kelola keuangan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota tepat waktu =100 %	Capaian Pelayanan administrasi Perkantoran tepat waktu = 100 %			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD = 100%	Capaian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD = 100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = 2 dokumen	2 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD = 1 dokumen	1 dokumen			

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD= 1 dokumen	1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD= 1 dokumen	1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD= 1 dokumen	1 dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD= 1 doklumen	1 dokumen			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah = 12 Laporan	12 Laporan			

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi keuangan PD yang dilaksanakan = 100%	100 %			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD= 2 laporan	2 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD= 18 laporan	18 Laporan			
				Penyusunan Pelaporan & Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran= 1 dokumen	1 dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Kepegawaian PD = 100%	100%			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai = 1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan = 10 Orang	10 Orang			

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi Umum PD = 100%	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan = 1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan = 1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan = 1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan = 1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan= 2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan = 5 Dokumen	5 Dokumen			

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendas i DPRD
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu = 12 Laporan	12 Laporan			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = 12 Laporan	12 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah = 100%	100%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan= 1 Unit	1 Unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan = 2 Unit	2 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah= 100%	100%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat = 12 Laporan	12 Laporan			

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan = 12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan = 12 Laporan	12 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayar pajaknya = 7 unit	7 unit			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya = 3 Unit	3 Unit			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara = 5 Unit	5 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi = 6 Unit	6 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi/ Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi = 26 Unit	26 Unit			

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Peningkatan pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan = 1 Unit Kerja	1 Unit Kerja			
				Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Capaian BOR : 50 %	BOR : 50 %			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan UKP dan UKM yang dilaksanakan= 100 %	100 %			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/Kota yang disediakan = 100%	100%			
				Rehabilitasi dan pemeliharaan RS	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit = 35 Unit	35 Unit			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan = 2 Unit	2 Unit			

No	Ururan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan = 10 Unit	10 Unit			
				Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik yang dilakukan kalibrasi berkala = 1 paket	1 paket			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/kota	Persentase layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kab/Kota yang disediakan = 100 %	100%			
				Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan = 1 Dokumen	1 Dokumen	- Jumlah pasien tanggungan negara yang dilayani menyesuaikan dgn anggaran yang tersedia - Biaya perawatan pasien berbeda, tergantung pada diagnosa dan lama hari rawat pasien.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan= 1 Dokumen Orang	1 Dokumen Orang			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat = 12 Dokumen	12 Dokumen	Sesuai dengan jumlah pendamping pasien, dimana makanan pendamping diberikan kepada keluarga/pendamping pasien JKN PBI, jampersal dan		

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							pasien tanggungan negara rawat inap dan diberikan 3 kali sehari selama pasien tersebut dirawat.		
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi= 100%	100%			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan= 1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota= 100%	100%			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan = 1 Unit	1 Unit			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang meningkat kapasitasnya = 100%	100%			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota = 100 %	100 %			

No	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) = 168 Orang	168 Orang	Sesuai berdasarkan kebutuhan pemenuhan standar sdmk		
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan = 100%				
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan					

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan (Wajib Diisi Jika Ada)

- 3.2.1 Peningkatan/Rehabilitasi sarana dan prasarana secara bertahap dalam Upaya pemenuhan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sesuai dengan PerPres nomor 59 tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Perubahan Ketiga atas PerPres nomor 82 tahun 2018.
- 3.2.2 Meningkatkan upaya pemenuhan alat kesehatan canggih melalui Pengusulan pengadaan alat kesehatan canggih pada Program KJSU-KIA SIHREN.

BAB V
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKjIP) UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Secara rinci Sasaran Strategis yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan indikator :

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat : 86,5 poin

Untuk melaksanakan program dan kegiatan di RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 serta upaya mencapai target kinerja yang ingin diperoleh, seluruh anggaran diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 dengan rincian:

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SILPA	%
1	BELANJA OPERASI	30.927.368,312	30.174.866.966	752.501.346	97,57%
2	BELANJA MODAL	10.590.762.787	10.294.377.169	296.385.618	97,20%
3	TOTAL	41.518.131.099	40.469.244.135	1.048.886.964	97,47%

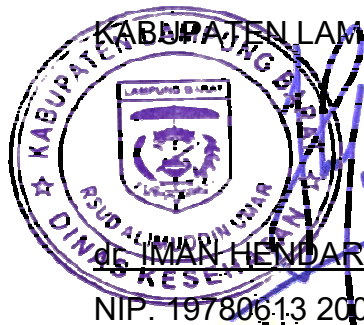
Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh UPT RSUD Alimuddin Umarl Kabupaten Lampung Barat adalah 97,47% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa Perencanaan Program dan Kegiatan pada UPTRSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sudah relative baik, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat, meskipun masih perlu beberapa perbaikan dalam penyusunan perencanaan di masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kepala Daerah tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT RSUD Alimuddin Umar dalam mencapai visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025–2029 yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Lampung Barat

Liwa, Februari 2025

DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



OLIMAN HENDARMAN, M.Kes., Sp.A

NIP. 19780613 200501 1 011

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tabel realisasi pendapatan BLUD tahun 2025
2. Tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025
3. Tabel Prestasi yang dicapai pada tahun 2025

PEMBIAYAAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN PE

A. PENDAPATAN

NO	URAIAN	SUMBER DANA	TAHU	
			2025	
			SEBELUM	
1	Pendapatan APBD		Rp	15.174.991.684,00
2	Pendapatan BLU	RSUD AU	Rp	23.000.000.000,00
3	Pembiayaan (Silpa)		Rp	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN		Rp	41.174.991.684,00

B. BELANJA

NO	URAIAN	SUMBER DANA	TAHUN	
			SEBELUM	
	BELANJA APBD			
1	Belanja Operasi	APBD	Rp	6.180.145.684,00
2	Belanja Modal	APBD	Rp	8.994.846.000,00
	JUMLAH BELANJA APBD		Rp	15.174.991.684,00
	BELANJA BLUD			
1	Belanja Operasi	BLUD	Rp	24.402.883.213,00
2	Belanja Modal	BLUD	Rp	1.597.116.787,00
	JUMLAH BELANJA BLUD		Rp	26.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA APBD+BLUD		Rp	41.174.991.684,00

NDAPATAN DAN BELANJA RSUD ALIMUDDIN UMAR TH 2025

IN	Bertambah/(berkurang)	KET
5	Jumlah	
SESUDAH		
Rp 15.007.271.884,00	(167.719.800)	Pendapatan DAU, DAK
Rp 24.400.000.000,00	1.400.000.000	Retribusi pelayanan kesehatan dan pendapan lain-lain yang sah
Rp 2.110.859.215,00	(889.140.785)	Silpa tahun 2024
Rp 41.518.131.099,00	Rp 343.139.415,00	

2025	Bertambah/(berkurang)	KETERANGAN
SESUDAH	Jumlah	
Rp 6.013.625.884,00	(166.519.800)	Anggaran Program, kegiatan dan sub kegiatan
Rp 8.993.646.000,00	(1.200.000)	
Rp 15.007.271.884,00	(167.719.800)	
Rp 24.913.742.428,00	510.859.215	Peningkatan Pelayanan BLUD
Rp 1.597.116.787,00	-	
Rp 26.510.859.215,00	510.859.215	
Rp 41.518.131.099,00	343.139.415	



 dr. Intan Hendayani, M.Kes., Sp.A

 NIP. 19780411200501011

**REKAPITULASI ANGGARAN SEBE
TAHUN ANG**

URUSAN WAJIB/PILIHAN : URUSAN WAJIB
SKPD PELAKSANA : RSUD Alimuddin Umar Liwa

NO	PROGRAM	KEGIATAN	Angg
			Sebelum
1	2	3	6
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			41.174.991.684,00
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		31.512.022.700,00
	01.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.018.400,00
	01.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.564.000
	01.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.375.000
	01.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.595.000
	01.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.523.600
	01.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.355.800
	01.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.425.000
	01.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.180.000
	01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.250.000
	01.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000
	01.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.000.000
	01.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.250.000
	01.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.650.000
	01.02.01.2.05.05	monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	17.150.000
	01.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	52.500.000
	01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	898.277.700,00

	01.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000
	01.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Kantor	102.430.000
	01.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	199.999.700
	01.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000
	01.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	138.200.000
	01.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000
	01.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.683.000
	01.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.925.000
	01.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.473.328.000
	01.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.225.000
	01.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.437.103.000,00
	01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.115.000,00
	01.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.200.000
	01.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	524.995.000
	01.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.920.000
	01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.383.600
	01.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	176.100.000
	01.02.01.2.09.03	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan alat besar	49.999.600
	1.02.01.2.09.06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	61.650.000
	01.02.01.2.09.09	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	108.810.000
	01.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.824.000

	01.02.01.2.10	Peningkatan pelayanan BLUD	26.000.000.000,00
	01.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	26.000.000.000,00
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		6.562.517.984,00
	01.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	6.097.306.984,00
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan pemeliharaan RS	399.810.000,00
	1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	105.300.000,00
	01.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.500.000.000
	1.02.02.2.01.20	pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	92.196.984
	01.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/kota	380.402.000,00
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	92.000.000
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	50.252.000,00
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	238.150.000
	01.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	47.489.000,00
	01.02.02.2.03.02	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	47.489.000,00
	01.02.02.2.04	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	37.320.000,00
	01.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	37.320.000,00
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		3.100.451.000,00
	01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3.048.400.000,00

	01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	3.048.400.000,00
	01.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kab/Kota	52.051.000,00
	01.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Kab/Kota	52.051.000,00
J U M L A H			41.174.991.684,00

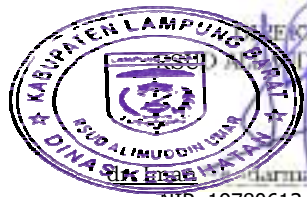
**SLUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
KURANG 2025**

garan	selisih (lebih/kurang)	Persentase	KET
Sesudah		(%)	
7		8	9
41.518.131.099,00	343.139.415,00	100,83	
31.894.944.015,00	382.921.315,00	101,22	
48.233.800,00	- 31.784.600,00	60,28	
17.779.600	- 2.784.400,00	86,46	
3.465.500	- 7.909.500,00	30,47	
5.531.800	- 5.063.200,00	52,21	
5.780.800	- 742.800,00	88,61	
5.489.300	- 866.500,00	86,37	
2.211.800	- 2.213.200,00	49,98	
7.975.000	- 12.205.000,00	100,00	
	-		
5.124.700,00	- 5.125.300,00	50,00	
1.500.000	- 1.500.000,00	50,00	
1.999.700	- 2.000.300,00	49,99	
1.625.000	- 1.625.000,00	50,00	
61.140.000	- 8.510.000,00	87,78	
8.640.000	- 8.510.000,00	50,38	
52.500.000	-		
809.415.700,00	- 88.862.000,00	90,11	

116.006.000	56.006.000,00	193,34	
102.430.000	-		
197.978.700	- 2.021.000,00	98,99	
225.000.000	-	100,00	
69.004.000	- 69.196.000,00	49,93	
5.040.000	-	100,00	
7.427.000	- 256.000,00	96,67	
86.530.000	- 73.395.000,00	54,11	
3.473.328.000	-	100,00	
36.225.000	-	100	
3.437.103.000,00	-		
598.350.000,00	40.235.000,00	107,21	
4.200.000,00	-	100,00	
562.830.000,00	37.835.000,00	107,21	Penambahan sesuai kebutuhan pembayaran rekening listrik
31.320.000,00	2.400.000,00	108,30	Penambahan honor bendaharawan barang selama 6 bulan
388.492.600	- 33.891.000,00	91,98	
176.100.000	-	100,00	
17.334.600	- 32.665.000,00	34,67	
60.424.000	- 1.226.000,00	98,01	
108.810.000	-	100,00	
25.824.000	-	100,00	
	-		

26.510.859.215,00	510.859.215,00	101,96	
26.510.859.215,00	510.859.215,00	101,96	Penyesuaian terhadap penghitungan kenaikan dari jasa pelayanan
	-		
6.535.224.084,00	- 27.293.900,00	99,58	
6.097.306.984,00	-	100,00	
399.810.000,00	-	100,00	
105.300.000,00	-	100,00	
5.500.000.000,00	-	100,00	
92.196.984,00	-	100,00	
	-		
397.715.600,00	17.313.600,00	104,55	
67.827.200,00	- 24.172.800,00	73,73	
27.256.000	- 22.996.000,00	54,24	
302.632.400,00	64.482.400,00	127,08	Penambahan pada kegiatan upaya kesehatan khusus untuk pasien tanggungan negara
19.519.000,00	- 27.970.000,00	41,10	
19.519.000,00	- 27.970.000,00	41,10	
20.682.500,00	- 16.637.500,00	55,42	
20.682.500	- 16.637.500,00	55,42	
3.087.963.000,00	- 12.488.000,00	99,60	
3.048.400.000,00	-	100,00	

3.048.400.000,00	-	100,00	
39.563.000,00	- 12.488.000,00	76,01	
39.563.000,00	- 12.488.000,00	76,01	
	-		
41.518.131.099,00	343.139.415,00	100,83	


 DINA SUKRIYATI, M.Kes., Sp.A
 NIP. 19780613 200501 011

URUSAN WAJIB/PILIHAN : URUSAN WAJIB
SKPD PELAKSANA : RSUD Alimuddin Umar Liwa

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TINGKAT PENCAPAIAN INDIKATOR KELUARAN
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
01.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA		
	01.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi
	01.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD
	01.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD
	01.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	01.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD
	01.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	01.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	01.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja OPD
	01.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	01.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	01.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
	01.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan prognosis realisasi anggaran

	01.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian
	01.02.01.2.05.05	monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
	01.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
	01.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan administrasi umum
	01.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik
	01.02.01.2.06.02	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan = 1 Paket
	01.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan RT yang disediakan
	01.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan
	01.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan RM
	01.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU
	01.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis penyediaan makanan, minuman tamu
	01.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	01.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggarannya pengadaan BMD

	01.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang disediakan
	01.02.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
		-Belanja Konsultasi & Pengawasan Konstruksi	
		-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
		-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
	01.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
	01.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat
	01.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air dan telepon
	01.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan tenaga pelaksana penyediaan jasa pelayanan umum
	01.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	01.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas perorangan yang terpelihara dan dibayar pajaknya
	01.02.01.2.09.03	penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	
	1.02.01.2.09.06	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dab bangunan lainnya	
	01.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara baik

	01.02.01.2.10	Peningkatan pelayanan BLUD	Terselenggaranya pelayanan bagi semua pasien
	01.02.01.2.10.01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
01.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
	01.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dinas, Alat Kesehatan, sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan pemeliharaan RS	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh RS
	1.02.02.2.01.11	rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas tenaga kesehatan	
	01.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang disediakan
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpeliharaan sesuai standar
	01.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/kota	Jumlah jenis pelayanan dilaksanakan RSUD
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi kesehatan
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA	jumlah dokumen orang yang mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan jiwa dan NAPZA
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	1.02.02.2.03	penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Terselenggaranya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya izin RS kelas C

	1.02.02.2.04.03	Peningkatan mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan
01.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		PERSENTASE SDM K YANG MEMILIKI KAPASITAS SESUAI STANDAR
	01.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana kebutuhan dan pendayagunaan SDM K untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/Kota
	01.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM K yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM K Tingkat Daerah Kab/Kota
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM K tingkat daerah Kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya
J U M L A H			

**LAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD PELAKSANA	BELANJA LANGSUNG		Persentase	KET
	ANGGARAN	REALISASI	(%)	
5	6	7	8	9
	41.518.131.099,00	40.469.244.135,00	97,47	
	31.894.944.015,00	31.680.707.778,00	99,33	
	48.233.800,00	48.090.800,00	99,70	
RSUD Alimuddin Umar	17.779.600	17.715.600	99,64	
RSUD Alimuddin Umar	3.465.500	3.465.500	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	5.531.800	5.531.800	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	5.780.800	5.780.800	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	5.489.300	5.489.300	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	2.211.800	2.171.800	98,19	
RSUD Alimuddin Umar	7.975.000	7.936.000	99,51	
	5.124.700	5.074.700	99,02	
RSUD Alimuddin Umar	1.500.000	1.500.000	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	1.999.700	1.949.700	97,50	
RSUD Alimuddin Umar	1.625.000	1.625.000	100,00	

	61.140.000	61.082.605	99,91	
RSUD Alimuddin Umar	8.640.000	8.610.000	99,65	
RSUD Alimuddin Umar	52.500.000	52.472.605	99,95	
	809.415.700,00	808.619.310,00	99,90	
RSUD Alimuddin Umar	116.006.000	116.005.900	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	102.430.000	101.996.810	99,58	
RSUD Alimuddin Umar	197.978.700	197.948.700	99,98	
RSUD Alimuddin Umar	225.000.000	224.827.750,00	99,92	
RSUD Alimuddin Umar	69.004.000	68.894.150,00	99,84	
RSUD Alimuddin Umar	5.040.000	5.040.000	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	7.427.000	7.376.000	99,31	
RSUD Alimuddin Umar	86.530.000	86.530.000	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	3.473.328.000	3.464.364.027	99,74	

RSUD Alimuddin Umar	36.225.000	36.225.000	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	3.437.103.000	3.428.139.027	99,74	
	115.661.000	114.471.525	98,97	
	1.321.442.000	1.321.442.000	100,00	
	2.000.000.000	1.992.225.502	99,61	
	598.350.000,00	543.211.329,00	90,78	
RSUD Alimuddin Umar	4.200.000	4.200.000	100,00	Pembayaran sesuai dengan kebutuhan administrasi surat masuk dan surat keluar
RSUD Alimuddin Umar	562.830.000	507.691.329,00	90,20	
RSUD Alimuddin Umar	31.320.000	31.320.000	100,00	
	388.492.600	384.430.949	98,95	
RSUD Alimuddin Umar	176.100.000	173.842.000	98,72	
	17.334.600	16.135.150	93,08	
RSUD Alimuddin Umar	60.424.000	60.424.000	100,00	
	108.810.000	108.250.799	99,49	
RSUD Alimuddin Umar	25.824.000	25.779.000	99,83	

	26.510.859.215,00	26.365.834.058,00	99,45	
RSUD Alimuddin Umar	26.510.859.215,00	26.365.834.058,00	99,45	Belanja sesuai dengan pembayaran dari klaim yang diajukan, dan baru terklaim pada bulan Desember
	6.535.224.084,00	6.314.623.357,00	96,62	
RSUD Alimuddin Umar	6.097.306.984,00	5.902.137.437,00	96,80	
RSUD Alimuddin Umar	399.810.000,00	399.810.000,00	1,00	
	105.300.000,00	104.931.215,00	99,65	
RSUD Alimuddin Umar	5.500.000.000	5.311.750.981,00	96,58	Adanya penyesuaian harga dan sesuai dengan nilai kontrak
RSUD Alimuddin Umar	92.196.984	85.645.241,00	99,71	
	397.715.600,00	372.333.495,00	93,62	
RSUD Alimuddin Umar	67.827.200	67.827.200	83,22	
RSUD Alimuddin Umar	27.256.000	18.746.000,00	68,78	
RSUD Alimuddin Umar	302.632.400	285.760.295,00	94,42	
RSUD Alimuddin Umar	19.519.000,00	19.469.925,00	99,75	
RSUD Alimuddin Umar	19.519.000,00	19.469.925,00	99,75	
	20.682.500,00	20.682.500,00	100,00	

RSUD Alimuddin Umar	20.682.500,00	20.682.500,00	100,00	
RSUD Alimuddin Umar	3.087.963.000,00	2.473.913.000,00	69,20	
RSUD Alimuddin Umar	3.048.400.000,00	2.436.700.000,00	79,93	
RSUD Alimuddin Umar	3.048.400.000,00	2.436.700.000,00	79,93	Belum terpenuhinya target SDM Medis, yaitu dokter umum 2 org, dan dokter spesialis kedokteran fisik dan Rehabilitasi Medik 1 org
RSUD Alimuddin Umar	39.563.000,00	37.213.000,00	94,06	
RSUD Alimuddin Umar	39.563.000,00	37.213.000,00	94,06	
	41.518.131.099,00	40.469.244.135,00	97,47	


 DIREKTUR
 RSUD ALIMUDDIN UMA
 M. Kesa
 NIF. 15700613 200501 01

INDIKATOR KINERJA	
TARGET	Realisasi
10	11
4 Dokumen	4 dokumen
1 Dokumen	1 dokumen
1 Dokumen	1 dokumen
1 Dokumen	1 dokumen
1 Dokumen	1 dokumen
12 laporan	12 laporan
6 laporan	6 laporan
1 Dokumen	1 dokumen
19 laporan	19 laporan
1 Dokumen	1 dokumen

1 dokumen	1 dokumen
10 orang	10 orang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 16 jenis (1 paket)	16 jenis (1 paket)
Jumlah: 1 paket	1
Jumlah paket Bahan logistik Kantor : 7 jenis (1 paket)	7 jenis (1 paket)
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan : 2 paket	2 paket
Jumlah SKHU: 5 dokumen	5 dokumen
Jumlah laporan pasilitas kunjungan tamu/ makan minum tamu yang di penuhi :12	12 jenis
Jumlah raporan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yg di selenggarakan :12 bulan	12 bulan

Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan/disewa :3 unit	3 unit
Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di adakan/direhabilitasi : 2 gedung	2 gedung
Jumlah laporan: 12	12
Jumlah laporan : 12 laporan	12 laporan
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor: 12 laporan	12 laporan
Jumlah :14 unit	14 unit
Jumlah: 5 unit	5 unit
Jumlah : 26 unit	26 unit

Jumlah fasilitas : 1 unit kerja	Jumlah fasilitas : 1 unit kerja
Jumlah : 1 paket	1
jumlah: 2 unit	2 unit
jumlah : 24 unit	24 unit
Jumlah: 1 paket	1 paket
Jumlah: 3 dokumen	3 dokumen
Jumlah 1 dokumen 46 orang	1 dokumen 0 orang
Jumlah : 12 dokumen	12 dokumen
Jumlah : 25 buku profil RS	25 buku profil RS

Jumlah:162 orang	159 orang
Jumlah: 162 orang	159 orang
Jumlah : 60 Orang	60 orang

R

Sp.A
1

**PRESTASI YANG DICAPAI
TAHUN 2025**

N0	URAIAN KEGIATAN	PRESTASI	
		KABUPATEN	PROVINSI
1	Meraih akreditasi dengan predikat Paripurna tahun 2022 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit (LARS) pada tahun 2022 dan berlaku sampai dengan tahun 2026.		
2	Terbaik pertama atas Penilaian Kinerja Penyerapan Anggaran APBD melalui Sistem Informasi Aplikasi Pelaporan Pembangunan secara Online (SiAPP Online) tahun 2025	√	

	KET
NASIONAL	
√	

DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DE IMAN HENDRI MAN MKes., Sp.A
NIP. 19780613 200501 1 011